

Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah,Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus,Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal serta dampaknya pada Kemandirian Keuangan Daerah

The Influence of Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on Capital Expenditures and their Impact on Regional Financial Independence

Salsa Alivia¹, Meilani Purwanti².

^{1,2}Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

Narahubung: Salsa Alivia¹, email: salsa10221040@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diajukan: 29/07/2025
Diterima: 29/07/2025
Diterbitkan: 31/07/2025

Kata Kunci:
Dana Alokasi Khusus,Dana Bagi Hasil,Belanja Modal,Kemandirian Keuangan Daerah

A B S T R A K

Studi ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, yang dimediasi melalui belanja modal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data laporan APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2023. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan menghasilkan total 81 sampel. Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif melalui analisis regresi dan uji Sobel, yang diolah menggunakan software SPSS IBM versi 27. Berdasarkan hasil analisis, pajak daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, retribusi daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal. Sementara itu, dana alokasi khusus memberikan pengaruh positif. Selain itu, belanja modal juga berfungsi sebagai variabel mediasi antara pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah.

A B S T R A C T

This study explores the impact of regional taxes, regional levies, general allocation funds, special allocation funds, and revenue sharing funds on regional financial independence, with capital expenditure acting as a mediating variable. The analysis is based on data from the 2021–2023 Regency/City Regional Budget (APBD) reports in West Java Province. Secondary data were gathered from the APBD reports accessible via <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. The sampling method applied was purposive sampling, which resulted in a total of 81 samples. This research adopts a quantitative approach, utilizing regression analysis and the Sobel test conducted with IBM SPSS software version 27. The results indicate that regional taxes positively and significantly influence capital expenditure; regional levies negatively affect capital expenditure; revenue sharing funds also have a negative impact on capital expenditure; general allocation funds exert a negative effect as well; while special allocation funds positively affect capital expenditure. Additionally, the study finds that capital expenditure mediates the relationship between regional taxes and regional financial independence.

Keywords:
Special, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital Expenditure, Regional Financial Independence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i7>

e – ISSN: 2656-6362
p – ISSN: 2614-6681

©2025 Proceeding FRIMA, All rights reserved.

1. Pendahuluan

Terbatasnya kemampuan pemerintah pusat untuk mengawasi pembangunan secara menyeluruh di seluruh daerah mendorong pelimpahan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh kesempatan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri (Antari dan Sedana, 2018). Melalui kebijakan desentralisasi ini, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya melalui pengelolaan keuangan sendiri yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat peranan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pajak daerah serta retribusi daerah yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, semakin kuat kemandirian daerah tersebut. Namun, ketergantungan daerah pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Alokasi transfer dana tersebut diharapkan dapat mendukung belanja modal, namun dalam kenyataannya, efisiensi penggunaannya tidak selalu optimal.

Belanja modal memegang peranan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam prioritas anggaran antara belanja rutin dan belanja modal di banyak daerah di Indonesia. Situasi ini dapat memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana faktor-faktor seperti pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal, serta dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah.

Perbandingan Laporan Realisasi PAD & Dana Perimbangan

Tahun	Akun	Realisasi
2021	Pendapatan Asli Daerah	Rp 15.261.060.000.000
	Dana Perimbangan	Rp 43.539.550.000.000
2022	Pendapatan Asli Daerah	Rp 17.375.680.000.000
	Dana Perimbangan	Rp 50.633.950.000.000
2023	Pendapatan Asli Daerah	Rp 18.768.210.000.000
	Dana Perimbangan	Rp 53.673.450.000.000

Sumber : DJPK

2. Kajian Teori

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap maupun aset lain yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, biasanya lebih dari satu tahun. Menurut Mahmudi (2019), belanja modal adalah jenis pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang masa manfaatnya melebihi satu periode anggaran. Melalui pengelolaan belanja modal yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri aktivitas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan layanan publik. Sumber pembiayaan ini berasal dari pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat dan menjadi unsur penting bagi keberlangsungan keuangan daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kewajiban berupa sumbangan yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku, tanpa memperoleh balas jasa secara langsung.

Pemungutan pajak ini bertujuan untuk mendukung kepentingan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dipungut pemerintah daerah dari masyarakat maupun pelaku usaha sebagai bentuk pembayaran atas pelayanan atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak seperti pajak, retribusi memberikan imbalan langsung kepada pembayar, berupa manfaat atau layanan yang bersifat khusus.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan mengurangi kesenjangan kapasitas keuangan antar wilayah sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal. Menurut Mahmudi (2019), dana ini merupakan transfer dari pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah. Sebagian Dana Alokasi Umum juga dapat dimanfaatkan untuk belanja modal guna mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk membiayai program atau kegiatan tertentu yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dana ini bersifat spesifik, sehingga penggunaannya difokuskan pada pembiayaan kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional di daerah, terutama untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan jalan. (Madiasmu, 2018). Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara yang diperoleh dari wilayah daerah tertentu. Dana yang dibagikan pemerintah pusat ke daerah berdasarkan penerimaan dari pajak pusat atau sumber daya alam di daerah tersebut. Dana bagi hasil dapat dimanfaatkan untuk mendanai belanja modal sehingga meningkatkan kualitas layanan publik. (Halim, A 2016).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif (*quantitative approach*) karena bertujuan mengevaluasi hubungan antar variabel secara objektif serta menghasilkan temuan yang dapat diukur secara statistik. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kausalitas, yang berfungsi untuk mempelajari hubungan sebab-akibat di antara dua atau lebih variabel. Fokus utama penelitian ini adalah meneliti pengaruh variabel independen seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil terhadap variabel dependen berupa kemandirian keuangan daerah, dengan belanja modal sebagai variabel perantara. Objek penelitian mencakup Laporan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021 hingga 2023. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap belanja modal, serta menelaah sejauh mana peran dominan dana transfer dalam membiayai belanja modal dan kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah. Populasi penelitian meliputi seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota pada periode tersebut yang memiliki data lengkap dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dan keandalannya sehingga dinilai sesuai untuk dianalisis, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait hubungan antar variabel yang diteliti. Teknik penetapan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan benar-benar sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditentukan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil dari model regresi untuk uji t, adalah sebagai berikut: Persamaan 1

a. Dependent Variable: Belanja
Modal Sumber : Diolah

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.027	.047		-.572	.569
	Belanja Modal	7.039E-13	.000	.718	9.160	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Diolah Penulis (2025)

Gambar 1. Uji SPSS

Mengacu pada tabel persamaan 1 dari hasil uji regresi tersebut, terlihat bahwa variabel independen yang diteliti tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, persamaan berikut dapat diartikan sebagai berikut

$$Z = 102771574258,348 + 0,308X_1 + 0,169X_2 + 0,250X_3 + 0,030X_4 + 0,260X_5 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 102.771.574.258,348 mengindikasikan bahwa jika semua variabel independen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berada dalam kondisi tetap atau bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen berupa kemandirian keuangan daerah akan tetap berada di angka tersebut.
2. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,308 memiliki tanda positif, yang artinya jika terjadi peningkatan pajak daerah sebesar satu satuan, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat sebesar 0,308, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah.
3. Koefisien regresi retribusi daerah bernilai 0,169, juga positif, menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan retribusi daerah dapat mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,169.
4. Koefisien regresi dana bagi hasil adalah 0,250. Koefisien positif ini berarti bahwa jika dana bagi hasil naik sebesar satu satuan, maka kemandirian keuangan daerah akan naik sebesar 0,250.
5. Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,030 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada dana alokasi umum dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,030.
6. Koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 0,260 juga positif, yang berarti kenaikan satu satuan pada dana alokasi khusus dapat mendorong kenaikan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,260.

Persamaan 2

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi (Persamaan 2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.027	.047		-.572	.569
	Belanja Modal	7.039E-13	.000	.718	9.160	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah
Sumber : Diolah Penulis (2025)

$$Z = 0,027 + 7,039 + e$$

Pada tabel hasil pengolahan data di atas, persamaan regresi dapat dilihat atau dibaca pada kolom "B", sehingga model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,027, artinya jika belanja modal tangguhannya bernilai 0, maka kemandirian keuangan memiliki akan bernilai -0,027.

2. Belanja modal

Koefisien regresi belanja modal bernilai 7,039. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan satu kali belanja modal, maka dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 7,039.

Persamaan 3

Tabel 4. 2. Hasil Uji Analisis Regresi (Persamaan 3)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	.293	.034		8.494
Pendapatan Daerah	4.413E-13	.000	.988	17.103
Retribusi Daerah	4.975E-13	.000	.072	1.511
Dana Bagi Hasil	-3.716E-14	.000	-.018	-.304
Dana Alokasi Umum	-1.280E-13	.000	-.181	-2.356
Dana Alokasi Khusus	-1.910E-13	.000	-.169	-2.219

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Diolah Penulis (2025)

$$Y = \alpha + X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + e$$

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data di atas, persamaan regresi linear berganda dapat dilihat pada kolom "B", sehingga model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,293 + 4,413 + 4,975 - 3,716 - 1,280 - 1,910$$

Adapun penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,293 menunjukkan koefisien positif, yang berarti apabila semua variabel independen bernilai nol, maka kemandirian keuangan daerah diperkirakan sebesar 0,293.
2. Koefisien regresi untuk pajak daerah sebesar 4,413 dengan tanda positif mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 4,413.
3. Koefisien regresi dana bagi hasil juga bernilai positif sebesar 4,975, yang berarti peningkatan satu satuan pada dana bagi hasil dapat mendorong kenaikan kemandirian keuangan daerah sebesar 4,975.
4. Koefisien regresi dana alokasi umum bernilai negatif sebesar -3,716. Artinya, apabila terjadi kenaikan satu satuan dana alokasi umum, maka kemandirian keuangan daerah justru berkurang sebesar 3,716.
5. Koefisien regresi dana alokasi khusus juga negatif, yaitu sebesar -1,910, sehingga setiap peningkatan satu satuan dana alokasi khusus akan menurunkan kemandirian keuangan daerah sebesar 1,910.

4 Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan belanja modal sebagai variabel perantara. Penelitian ini mengambil objek pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yang datanya bersumber dari laporan APBD tahun 2021 hingga 2023. Setelah dilakukan pemilihan sampel, terkumpul sebanyak 81 data selama periode tiga tahun. Adapun ringkasan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya, semakin tinggi penerimaan

dari pajak daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal secara mandiri.

2. Retribusi daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, yang berarti kontribusinya dalam mendukung pembangunan jangka panjang masih terbatas, baik dari segi nominal maupun pengelolaannya.
3. Dana bagi hasil juga tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk mendanai pembangunan fisik daerah masih belum optimal.
4. Dana alokasi umum tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat umumnya lebih banyak dipakai untuk belanja rutin daripada pembangunan infrastruktur.
5. Dana alokasi khusus juga tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Karena sifatnya yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), dana ini menjadi kurang fleksibel untuk mendorong peningkatan belanja modal daerah secara menyeluruh.
6. Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, semakin besar investasi belanja modal seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas publik, semakin meningkat kapasitas fiskal daerah, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat dapat berkurang.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat perlu lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi, agar belanja modal dapat ditingkatkan serta mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
2. Semangat kemandirian fiskal hendaknya diperkuat dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengeluaran belanja modal sebaiknya diprioritaskan untuk sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
4. Perlu meningkatkan efektivitas penggunaan DAU dan DAK melalui perencanaan program berbasis hasil serta monitoring dan evaluasi yang lebih baik, agar dana transfer benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan, bukan hanya untuk menutupi belanja rutin.
5. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan, dengan cakupan periode penelitian yang lebih panjang serta menambahkan variabel independen lain untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan relevan.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Teknologi Digital, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah atas data, informasi, dan referensi yang sangat membantu dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Badan Pusat Statistik atas publikasi data dan laporan keuangan daerah, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

7. Referensi

- (Adyatama & Oktaviani, 2015) Adyatama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stikubank*, 4(19979–4878), 190–205.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Farhan, M. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

- Terhadap Alokasi Belanja Modal investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu . perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jaw. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1).
- Kartika, S. E., Sutianingsih, S., & Widowati, W. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Damar Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 278–289. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Heinze, R. N. W. (2019). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Nabila, F. K. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh Leverage , Dana Perimbangan , Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1–16.
- Sari, P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Global Journal*, 1(1), 1745–1773. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321>
- Setiawan, A. W. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta Periode Tahun 2007-2013. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 19–27. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/318>
- Shinta Budi Astuti, Sarah Frantiska Santoso, & Sofyan Bantasyam. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS(DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(2), 94–105. <https://doi.org/10.35814/jiap.v1i2.2455>
- Syafira Frijunita, Gurendrawati, E., & Utaminingsih, T. H. (2024). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. 2(2), 98–114.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 79–92.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2019). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.